



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Mei 2020

Halaman: 1

Kurang Tepat, Silakan Laporkan

Penyaluran Bansos Harus Selesai Sebelum Lebaran

JOGJA, Radar Jogja - Dewan mendorong Pemprov DIJ segera menyelesaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) sebelum Lebaran tiba. Masyarakat sangat membutuh-

kan bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transparansi data penerima bansos juga disorot agar pembagian dapat lebih merata.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudianta meyakini, data yang ada saat ini tidak sepenuhnya valid. Ada banyak warga yang berhak namun belum terdata penerima. ▶ *Baca Kurang... Hal 3*

Kurang Tepat, Silakan Laporkan

Sambungan dari hal 1

Sebab, proses pendataan dilakukan secara cepat.

Desa-desa juga melaporkan banyak warga yang belum terakomodasi dalam pendataan tahap pertama. "Meskipun begitu tetap kami minta dicairkan dulu. Kalau menunggu data sempurna akan sangat lama dan masyarakat terlalu lama menderita," katanya kemarin (17/5).

Tahap verifikasi penerima bansos sudah final dengan total penerima sekitar 169 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah itu disortir dari 500 ribuan data yang ada. Bagi warga yang berhak namun belum tercover, perlu diakomodasi dalam pendataan. "Dibuatkan data tahap kedua untuk mengakomodasi warga yang belum mendapatkan jadup

di tahap pertama," jelasnya.

Lebih jauh Huda juga mempersilakan pemprov untuk merevisi anggaran secukupnya guna memenuhi keperluan pendanaan bansos. Adapun penyaluran bansos tahap pertama memerlukan anggaran sekitar Rp 209 miliar. "Silakan ditambahkan secukupnya untuk data tahap kedua dan kita akan setuju nanti saat pembahasan perubahan anggaran," tegasnya.

Ketua Komisi A Eko Suwanto menjelaskan, langkah membuka data diperlukan untuk memastikan agar dana bansos Covid-19 benar-benar tersalurkan kepada yang berhak. "Kami ingin pastikan dalam penyaluran bantuan berjalan baik dan dilakukan secara terbuka dengan basis data yang valid," katanya.

Langkah membuka data pen-



Huda Tri Yudianta

ting dijalankan oleh Pemprov DIJ agar masyarakat bisa langsung berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19. "Bantuan ini harus diberikan secara terbuka. Tidak boleh ada korupsi atau penyimpangan dalam pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19," katanya.

Asisten Sekretariat Daerah DIJ Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sigit Sapto Rahardjo menyatakan, bantuan disalurkan melalui kelurahan atau desamasing-masing dengan harapan warga tidak berkerumun saat pengambilan bantuan.

Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIJ, dari 169.383 KK penerima bansos, 11.713 merupakan warga Kota Jogja, 39.874 warga Sleman, 45.081 warga Bantul, 27.581 warga Kulonprogo, serta 45.134 warga Gunungkidul.

Pemprov bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga aparat kelurahan untuk memverifikasi data penerima bansos itu. "Jika ada warga belum terdaftar sebagai penerima bansos, padahal sebenarnya memenuhi kriteria, mereka dipersilakan melapor," kata Sigit. (tor/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005